

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pusataka

2.1.1 Teori Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota. Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat.

Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun tidak dalam melakukan tindakan tertentu. Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan

atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J. Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi

- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang” dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno :2009 : 11).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian

kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.

Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau

pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh

negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Berikut adalah definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik.

1. Thomas R. Dye (1981)

Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian.

2. Easton (1969)

Mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

3. Dye (1978)

Mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*Whatever governments choose to do or not to do.*”, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya

yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda.

Dia juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

4. David Easton

Mendefinisikan public policy sebagai : *“The authoritative allocation of value for the whole society, but it turns out that only the government can authoritatively act on the ‘whole’ society, and everything the government chooses to do or not to do result in the allocation of values.”* Maksudnya, public policy tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan-alasan yang harus dipertanggungjawabkan.

5. Chief J.O. Udoji (1981)

Mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai *“ An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large.”* Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau

sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures (Hakim, 2002).

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi:

1. Pembuatan kebijakan,
2. Pelaksanaan dan pengendalian, serta
3. Evaluasi kebijakan.

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu :

1. Penyusunan agenda,
2. Formulasi kebijakan,

3. Adopsi kebijakan,
4. Implementasi kebijakan, dan
5. Penilaian kebijakan.

2.1.2 Ekonomi Regional

Ilmu ekonomi regional merupakan bagian daripada ilmu ekonomi, dimana secara spesifik membahas tentang pembatasan pembatasan wilayah ekonomi dari suatu wilayah dengan mempertimbangkan kondisi dan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang tersedia disetiap wilayah ekonomi. Ilmu ekonomi regional tidak membahas tentang kegiatan individu, tetapi melainkan menganalisa suatu wilayah secara keseluruhan dengan mempertimbangkan potensi yang beragam yang dapat dikembangkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dari wilayah yang bersangkutan. Ruang (region) merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan wilayah. Konsep ruang mempunyai beberapa unsur yaitu :

1. Jarak,
2. Lokasi,
3. Bentuk
4. Ukuran

Konsep ruang sangat berkaitan erat dengan waktu, karena pemanfaatan bumi dan dengan segala ininya kekayaannya membutuhkan organisasi/

pengaturan ruang dan waktu . Unsur-unsur tersebut diatas secara bersama sama menyusun unit tataruang yang disebut wilayah.

Whittlessey (1945) memformulasikan pengertian tata ruang berdasarkan :

1. Unit areal kongkret
2. fungsionalitas diantara fenomena dan
3. subyektivitas dalam penentuan kriteria.

Kemudian Harthorne (1960) mengintroduksikan unsur hubungan fungsional diantara fenomena yang melahirkan konsep struktur fungsional tata ruang. Struktur fungsional tata ruang bersifat subyektif, karena dapat menentukan fungsionalitas berdasarkan criteria subyektif.

Menurut Hanafiah (1985) konsep jarak mempunyai dua pengetahuan : yaitu jarak absolute dan jarak relative yang mempengaruhi konsep ruang. Konsep jarak dan ruang relative ini berkaitan dengan hubungan fungsional diantara fenomena. Dalam struktur tata ruang , jarak relative merupakan fungsi dari pandangan atau persepsi terhadap jarak . Dalam konsep ruang absolute jarak diukur secara fisik, sedangkan dalam konsepruang relative jarak diukur secara fungsional berdasarkan unit waktu, ongkos dan usaha.

Wilayah administrative adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan adminitrasi pemerintahan atau politik. Seperti propinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan. Dan RT/RW. Sukirno (1976) menyatakan bahwa didalam praktek , apabila membahas mengenai pembangunan wilayah maka pengertian wilayah administrasi merupakan

pengertian yang paling banyak digunakan. Lebih populernya penggunaan pengertian tersebut disebabkan dua factor yakni:

- a. Dalam kebijaksanaan dan rencana pembangunan wilayah, diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintah . Dengan demikian lebih praktis apabila pembangunan wilayah didasarkan pada suatu wilayah administrasi yang telah ada.
- b. Wilayah yang batasnya ditentukan atas suatu administrasi pemerintah lebih mudah dianalisis , karena sejak lama pengumpulan data diberbagai bagian wilayah berdasarkan pada suatu wilayah administrasi tersebut.

Sebagai wilayah yang memperhatikan koherensi atas kesatuan keputusan keputusan ekonomi . Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadi perubahan – perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja, namun cukup kecil untuk memungkinkan persoalan persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai satu/kesatuan.

Wilayah perencanaan bukan hanya dari aspek fisik dan ekonomi, namun ada juga dari aspek ekologis. Misalnya dalam kaitannya dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pengelolaan daerah aliran sungai harus direncanakan dan dikelola mulai dari hulu sampai hilirnya.

Tujuan (goals) ilmu ekonomi regional sebetulnya tidak jauh berbeda dengan tujuan ilmu ekonomi pada umumnya. Ferguson (1965) mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan ekonomi adalah :

1. Full employment.

Menciptakan full employment atau setidaknya tingkat pengangguran yang rendah menjadi tujuan pokok pemerintahan pusat maupun daerah. Dalam kehidupan masyarakat, pekerjaan bukan saja berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus juga memberikan harga diri/status bagi yang bekerja.

2. Economic growth.

Adanya Economic growth (pertumbuhan ekonomi), karena selain menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, juga diharapkan dapat memperbaiki kehidupan manusia atau peningkatan pendapatan. Tanpa perubahan, manusia merasa jenuh atau bahkan merasa tertinggal.

3. Price stability.

Tercapainya Price stability (Stabilitas Harga) untuk menciptakan rasa aman/tentram dalam perasaan masyarakat. Harga yang tidak stabil membuat masyarakat merasa waswas, misalnya apakah harta atau simpanan yang diperoleh dengan kerja keras, nilai atau manfaat berkunjung di kemudian hari.

Ada di antara ekonomi yang tidak mungkin dilakukan daerah (pemerintah daerah) apabila daerah itu bekerja sendiri, yaitu menstabilkan tingkat harga. Namun, apabila daerah itu dapat memenuhi tujuan pertama dan kedua, hal itu turut membantu pemerintah pusat untuk memenuhi tujuan ketiga. Namun, di lain sisi, daerah karena wilayahnya yang lebih sempit, dapat membuat kebijakan yang lebih bersifat spasial sehingga ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh daerah secara lebih baik ketimbang oleh pemerintah pusat. Hal-hal yang bisa diatur di

daerah secara lebih baik, yang merupakan tujuan pokok tambahan yaitu sebagai berikut:

1. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup.
2. Pemerataan pembangunan dalam wilayah.
3. Penetapan sektor unggulan wilayah.
4. Membuat keterkaitan antar sektor yang lebih serasi dalam wilayah, sehingga menjadi bersinergi dan berkesinambungan.
5. Pemenuhan kebutuhan pangan wilayah.

2.1.3 Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur, menurut *American Public Works Association* (Stone,1974 dalam Kodoatie, R.J.,2005) infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Berdasarkan pengertian infrastruktur tersebut maka infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Secara teknik, pengertian infrastruktur dijelaskan sebagai aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Oleh karena itu, infrastruktur merupakan bagian-bagian berupa sarana dan

prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain yang didefinisikan dalam suatu sistem.

Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Ada beberapa faktor pendorong kebutuhan infrastruktur, antara lain:

a. Pertumbuhan penduduk

Adanya penambahan penduduk menyebabkan meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat. Terutama untuk kebutuhan pokok, antara lain makanan, pakaian, dan perumahan. Maka dari itu pemenuhan sarana prasarana sangat diperlukan sebagai penunjang kebutuhan masyarakat.

b. Urbanisasi

Tingginya angka urbanisasi masuk ke kota menyebabkan meningkatnya kebutuhan infrastruktur sebagai penunjang kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Contoh-contoh infrastruktur tersebut antara lain: transportasi, telekomunikasi, energi, perumahan, fasilitas umum, dsb.

c. Bencana alam

Munculnya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, air rob, gempa bumi, dll merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan infrastruktur. Pembangunan akan infrastruktur sangat diperlukan saat terjadinya bencana alam karena berfungsi sebagai alat pertolongan atau sebagai pengganti infrastruktur yang rusak akibat bencana alam tersebut, contoh pembangunan infrastruktur karena bencana alam misalnya pembangunan jalan dan jembatan, telekomunikasi, perumahan, fasilitas umum, listrik, dll.

Dampak pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi.

Dalam pembangunan ekonomi akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran suatu negara.

Sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dan investasi pembangunan diperlukan berbagai infrastruktur. Antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, dsb. Dorongan peningkatan pada subsektor listrik, subsektor jalan, subsektor transportasi dan subsektor komunikasi tersebut disebabkan karena tingkat permintaan dari subsektor tersebut terus mengalami peningkatan. Disamping itu, respon permintaan yang terus meningkat terhadap subsektor-subsektor tersebut diimbangi dengan banyaknya investasi pembangunan infrastruktur di subsektor-subsektor tersebut.

Sebagai contohnya adalah kebutuhan akan listrik. Indonesia mengalami permasalahan dalam listrik dimana suplai listrik tidak dapat memenuhi kebutuhan akan listrik yang mengakibatkan pemadaman di beberapa daerah secara bergiliran. Padahal listrik tidak hanya dibutuhkan pada rumah tangga-rumah tangga saja, namun juga sangat dibutuhkan pada sektor-sektor industri yang akan berdampak pada perekonomian masyarakatnya pula. Maka dari itu infrastruktur jaringan listrik merupakan komponen penting dalam menunjang aktivitas masyarakat dan juga sangat berpengaruh terhadap masalah perekonomian.

Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur jaringan jalan. Pembangunan jalan sangat tidak kalah penting dan diperlukan sebagai alat penghubung suatu tempat dengan tempat yang lain. Dengan adanya akses jalan yang mudah dijangkau akan mempengaruhi unsur strategis suatu tempat dan dengan mudahnya akses akan mempengaruhi banyaknya pihak swasta yang mau berinvestasi. Dengan banyaknya pihak swasta yang mau berinvestasi tersebut

akan mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Selain itu dengan adanya pembangunan-pembangunan infrastruktur salah satu contohnya seperti jaringan jalan juga akan memberi manfaat kesejahteraan masyarakat karena terbebas dari keterpencilan suatu tempat dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

Jaringan telekomunikasi pun juga memberi pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya banyak stasiun televisi swasta saat ini menjadi bukti bahwa cukup banyak investasi swasta di Indonesia di bidang pertelekomunikasian. Apalagi di era globalisasi seperti saat ini, telekomunikasi sangat diperlukan sebagai alat penunjang keberhasilan suatu negara. Dan permintaan akan sarana telekomunikasi saat ini juga semakin meningkat.

Sarana air bersih juga mempunyai peran sangat strategis untuk meningkatkan taraf hidup dan derajat kesehatan masyarakat, juga sebagai faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Namun dalam penyediaan baik segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas, belum berjalan berkesinambungan. Sisi lain, tuntutan kebutuhan air bersih yang memenuhi standar kesehatan terus mengalami peningkatan tanpa diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan.

Berdasarkan peran dan fungsinya seperti yang telah diungkapkan di atas (sebagai pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi).

2.1.4 UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Definisi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu sebuah usaha ekonomi produktif yang dijalankan perseorangan maupun badan usaha yang memiliki kekayaan bersih dan hasil penjualan tertentu, sehingga dimasukkan dalam kriteria UMKM. Sementara definisi UMKM menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM merupakan kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan industri kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk peralatan produksi lebih kecil dari 70 juta dan usahanya dimiliki WNI (Warga Negara Indonesia).

Berdasarkan jenisnya, UMK dibagi menjadi dua, yaitu usaha sektor formal dan sektor informal. Usaha formal didefinisikan sebagai usaha yang telah memiliki izin usaha, sehingga mendapatkan jaminan hukum untuk mendapat perlindungan dari pemerintah. Menurut Sumarni dan Soeprihantono (2005), usaha formal di Indonesia terdiri dari Perusahaan Perseorangan (UD), Firma, Perseroan Komanditer atau Commanditer Vennootschap (CV), dan PT (Perseroan Terbatas). Sementara usaha informal merupakan sebuah unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi dari pemerintah, namun terbatas dalam ruang lingkup kegiatannya (Hart dalam Asihanto, 2013). Adapun usaha informal menurut BPS dibagi menjadi lima subsektor ekonomi, antara lain: perdagangan, jasa, bangunan, angkutan, dan industri pengolahan.

- ✓ Kinerja Bisnis

Kinerja berasal dari kata *performance* yang diartikan sebagai hasil kerja/prestasi kerja. Menurut Bernardin (2001, p.143), definisi kinerja adalah catatan hasil yang diproduksi terhadap fungsi sebuah pekerjaan tertentu atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu keadaan yang mencerminkan tingkat pencapaian pelaksanaan pekerjaan di suatu institusi di lingkungan kerja dalam mewujudkan suatu sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Kinerja bisnis pada hakekatnya merupakan prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi bisnis yang dapat dilihat dari hasilnya (Hartini, 2012, p.85). Pengukuran terhadap sebuah kinerja bisnis merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan akan menjadi standar keberhasilan sebuah organisasi dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan perusahaan. Pengukuran terhadap sebuah kinerja bisnis merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan akan menjadi standar keberhasilan sebuah organisasi dalam kurun waktu tertentu.

2.1.5 Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang kontan maupun natura. Pendapatan atau juga disebut *income* dari seorang warga masyarakat adalah hasil “penjualannya” dari faktor-faktor produksi yang

dimilikinya pada sektor produksi. Dan sektor produksi ini “membeli” faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku dipasar faktor produksi. Harga faktor produksi dipasar faktor produksi (seperti halnya juga untuk barang-barang dipasar barang) ditentukan oleh tarik menarik, antara penawaran dan permintaan (Suryananto, 2005: 15).

Menurut Sukirno (2006: 76) permintaan seseorang akan suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Di antara beberapa faktor tersebut yang paling penting yaitu sebagai berikut:

- a. Harga barang itu sendiri.
- b. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut.
- c. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat.
- d. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat.
- e. Citra rasa masyarakat.
- f. Jumlah penduduk.
- g. Ramalan mengenai dimasa yang akan datang.

Jenis-jenis pendapatan dibagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Gaji dan Upah

Yaitu imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.

b. Pendapatan dari usaha sendiri

Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar. Usaha disini adalah usaha milik sendiri atau keluarga. Tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri serta nilai sewa capital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.

c. Pendapatan dari usaha lain

Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga dan biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain pendapatan dari hasil menyewakan asset yang dimiliki, bunga dan uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan dari pension. Untuk mengukur tingkat pendapatan dapat dilihat dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan banyak dan mempunyai nilai jual yang tinggi dan biaya produksi yang rendah, maka dengan sendirinya tingkat keuntungan yang diperoleh akan tinggi.

Menurut Swasta (2000: 201) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dari kegiatan penjualan antara lain:

a. Kondisi dan Kemampuan Pedagang

Transaksi jual beli melibatkan pihak pedagang dan pembeli. Pihak pedagang harus meyakinkan pembeli agar dapat mencapai sasaran penjualan yang diharapkan dan sekaligus mendapatkan pendapatan yang diinginkan.

b. Kondisi Pasar

Pasar sebagai kelompok pembeli barang dan jasa meliputi baik tidaknya keadaan pasar tersebut, jenis pasar, kelompok pembeli, frekuensi pembeli dan selera pembeli.

c. Modal

Setiap usaha membutuhkan modal untuk usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Dalam kegiatan penjualan semakin banyak produk yang dijual berdampak pada kenaikan keuntungan. Untuk meningkatkan produk yang dijual suatu usaha, harus membeli jumlah barang dagangan dalam jumlah besar. Untuk itu dibutuhkan tambahan modal untuk membeli barang dagangan atau membayar biaya operasional agar tujuan meningkatkan keuntungan dapat tercapai.

d. Kondisi Organisasi Perusahaan

Semakin besar suatu perusahaan akan memiliki bagian penjualan yang semakin kompleks untuk memperoleh keuntungan yang semakin besar dari usaha kecil.

e. Faktor lain

Faktor lain yang mempengaruhi pendapatan usaha yaitu periklanan ataupun kemasan produk.

2.1.6 Teori Keuntungan

Dalam bagian ini berasumsi bahwa tujuan dari produsen atau pengusaha adalah untuk memperoleh laba yang maksimum. Laba yang maksimum merupakan tujuan satu-satunya dari produsen. Dalam kondisi ini produsen atau pengusaha akan berusaha untuk memilih kombinasi *input* terbaik dan tingkat *output* yang menghasilkan keuntungan. Jadi perusahaan akan berusaha membuat perbedaan yang sebesar-besarnya antara biaya produksi dan penerimaan total.

Perusahaan yang menginginkan laba maksimum akan mengambil keputusan secara marjinal, dimana perusahaan dapat menyesuaikan variabelvariabel yang bisa dikontrol untuk memungkinkan memperoleh laba yang maksimum (Nicholson, 1999). Dengan pendekatan ini produsen akan memperoleh keuntungan pada saat *Marginal Cost* (MC) sama dengan *Marginal Revenue* (MR). Sepanjang laba marjinal (MR) positif, produsen boleh memproduksi lebih banyak *output*, dan menggunakan lebih banyak *input*, akan tetapi bila laba marjinal tersebut telah mencapai 0 maka sebaiknya produsenmenstop penambahan produksi sebab dengan penambahan produksi ini tidak akan membawa keuntungan bagi produsen.

Hubungan antara laba maksimum dengan pendekatan marjinal dapat dilihat dari penjelasan berikut. Pendapatan adalah selisih antara total penerimaan dan total pengeluaran.

$$\pi = TR - TC$$

Dimana π adalah pendapatan bersih, TR (*total revenue*) adalah total penerimaan dari perusahaan yang diperoleh dari perkalian antara jumlah barang yang terjual dengan harga barang tersebut.

$$TR = P \cdot Q$$

TC (*total cost*) adalah total biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam menghasilkan *output*. Untuk mencari *total cost* (biaya total) adalah dengan menjumlahkan total *fixed cost* (biaya tetap total) dengan total *variable cost* (biaya variabel total).

$$TC = TFC + TVC$$

Keterangan:

TC = *Total Cost*

TFC = *Total Fixed Cost*

TVC = *Total Variable Cost*

Keuntungan maksimal dicapai dengan syarat turunan pertama dari persamaan diatas sama dengan nol.

$$\frac{\partial \pi}{\partial Q} = \frac{\partial TR}{\partial Q} - \frac{\partial TC}{\partial Q} = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial Q} = MR - MC = 0$$

$$MR = MC$$

Keterangan:

$d\pi$ = laba maksimum

MR = *Marginal Revenue* atau turunan pertama dari TR ($\partial TR/\partial Q$)

MC = *Marginal Cost* atau turunan pertama dari TC ($\partial TC/\partial Q$)

2.1.7 Teori Analisis Dampak

Evaluasi dampak (*impact evaluation*) adalah kegiatan menilai perubahan-perubahan yang diakibatkan sebuah intervensi, seperti proyek, program atau kebijakan, baik berupa perubahan yang direncanakan maupun yang tak direncanakan. Berbeda dengan monitoring dampak (*outcome monitoring*) yang bertujuan menilai sejauh mana sasaran telah dicapai, evaluasi dampak dilakukan untuk menjawab pertanyaan: “seperti apa perubahan dampak yang dialami partisipan apabila intervensi tidak dilakukan?”.

Evaluasi dampak berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk sebab-dan-akibat (*cause-and-effect*). Dengan kata lain, evaluasi dampak mengukur perubahan dampak yang *secara langsung* diakibatkan oleh sebuah program. Evaluasi dampak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) prospektif dan (2) retrospektif. Pada evaluasi yang bersifat prospektif, penilaian dampak dirancang pada waktu yang bersamaan dengan perancangan program dan disertakan dalam implementasi program. Data baseline dikumpulkan sebelum pelaksanaan program, baik untuk kelompok intervensi maupun untuk kelompok pembanding. Evaluasi yang bersifat restrospektif menilai dampak program setelah program dilaksanakan, yaitu menilai bagaimana dampak program bagi kelompok intervensi dibandingkan dengan kondisi yang terjadi pada kelompok pembanding (Gertler, P.J., et al. 2011).

Untuk mengukur seberapa besar dampak suatu program yang dirasakan oleh kelompok yang dikenai program, dapat diformulasikan sebagai berikut.

Program Impact :

$$= (Y | P=1) - (Y | P=0)$$

$$= \text{Outcome status with program} - \text{Outcome status without program}$$

Yaitu perbedaan antara outcome yang diperoleh kelompok yang mendapat intervensi program dengan outcome yang diperoleh kelompok tersebut jika tidak mendapat intervensi pada periode yang sama. Permasalahannya adalah tidak mungkin melakukan observasi pada kelompok yang sama untuk dua kondisi yang

berbeda secara simultan atau bersamaan. Permasalahan ini yang disebut dengan istilah “*counterfactual problem*”.

Walaupun kita dapat mengobservasi dan mengukur outcome (Y) untuk kelompok partisipasi program ($Y | P = 1$), namun tidak ada data untuk mengukur bagaimana outcome kelompok ini jika tidak ada program ($Y | P = 0$). Dalam formula tersebut, maka ($Y | P = 0$) menunjukkan *outcome counterfactual*.

Oleh karena *outcome counterfactual* ini tidak dapat dihitung secara langsung dari kelompok partisipasi program, maka dapat dilakukan estimasi, yaitu dengan cara membuat kelompok kontrol atau kelompok pembanding. Kelompok pembanding ini harus identik atau mempunyai karakteristik yang sama dengan kelompok partisipasi.

Untuk mendapatkan kelompok pembanding dengan karakteristik yang sama dengan kelompok partisipasi tidak mudah. Oleh karena seringkali adanya kesulitan dalam mencari kelompok pembanding, oleh karena itu terdapat dua metode yang umum dipakai dalam mengantisipasi tidak adanya kelompok pembanding tersebut. Metode ini walaupun beresiko, namun secara ilmiah metode ini dapat dipergunakan dan biasa dipakai untuk membentuk kelompok pembanding dalam rangka mengestimasi *counterfactual*. Metode tersebut adalah:

1. Metode sebelum dan sesudah (*before-after* atau *pre-post method*)

Yaitu membandingkan outcome dari kelompok partisipasi sebelum dan setelah program dilaksanakan.

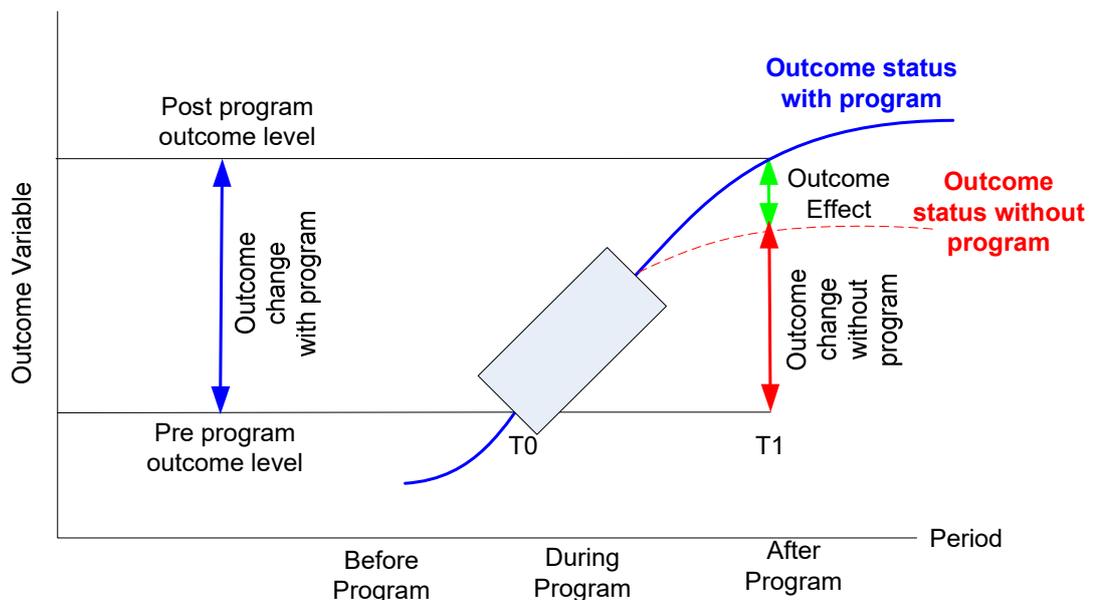
2. Dengan dan tanpa (*with and without method*)

Yaitu membandingkan outcome kelompok partisipan dengan kelompok yang tidak ikut program.

Berdasarkan konsep *outcome* tersebut, maka perlu dibedakan antara tiga konsep hasil atau outcome sebagai berikut:

1. *Outcome Level* adalah status atau kondisi *outcome* pada satu periode tertentu.
2. *Outcome Change* adalah perbedaan *outcome level* pada dua periode yang berbeda
3. *Outcome Effect* atau *Program Impact* adalah bagian dari *outcome change* yang dikontribusi oleh program sebagai lawan dari akibat faktor lain.

Perbedaan ketiga konsep *outcome* tersebut dapat digambarkan dengan skema berikut :



Gambar 2.1 Perbedaan Ketiga Konsep *Outcome*

Gambar 2.1 menunjukkan dampak dari pelaksanaan suatu program dapat diukur dengan cara membandingkan antar *outcome* kelompok sasaran yang dilewati program jika mereka dapat program dan *outcome* kelompok sasaran tersebut jika mereka tidak mendapatkan program.

Tabel 2.1 Metode Pengukuran Dampak Suatu Program

Ukuran	Yang diukur
Outcome change with program	<p>A. Kondisi kelompok masyarakat penerima bantuan (kelompok intervensi) pada T0 atau sebelum program dilaksanakan = <i>Pre program outcome level</i> = OI0</p> <p>B. Kondisi kelompok masyarakat penerima bantuan (kelompok intervensi) pada T1 atau sesudah program dilaksanakan = <i>Post program outcome level</i> = OI1</p> <p>C. Perbedaan kondisi kelompok masyarakat penerima bantuan (kelompok intervensi) sebelum (T0) dan sesudah (T1) program dilaksanakan = <i>outcome change with program</i> = OCWP = OI1 – OI0</p>
Outcome change without program	<p>A. Kondisi kelompok masyarakat yang tidak mendapat bantuan (kelompok pembanding) pada T0 = OP0</p> <p>B. Kondisi kelompok masyarakat yang tidak mendapat bantuan (kelompok pembanding) pada T1 = OP1</p> <p>C. Perbedaan kondisi kelompok masyarakat yang tidak menerima bantuan (kelompok pembanding) antara periode T0 dan T1 = OCNP = OP1 – OP0</p>
Outcome Effect	Perbedaan antara outcome change with program dengan outcome change without program = OCWP - OCNP

Sumber: Gertler, P.J. et al. 2011. *Impact Evaluation in Practice*. The World Bank.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian tentang perilaku usaha ekonomi telah dilakukan oleh para ahli, hal tersebut melahirkan hasil-hasil, teori dan konsep yang dimanfaatkan dalam berbagai penelitian.

Tinjauan pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan antara penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang baru akan dilakukan. Selain itu tujuan dari tinjauan pustaka juga dijadikan sebagai gambaran peneliti untuk memperkuat konsepnya dan untuk menganalisis hasil penelitian karena penelitian yang akan dilakukan ini bukanlah penelitian yang baru. Penelitian serupa sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, hanya saja memiliki ruang lingkup yang berbeda. Berikut adalah beberapa penelitian yang terkait dengan perilaku usaha ekonomi yang telah dilakukan seperti :

1. Devi Valeriani (2008)

Melakukan penelitian dengan judul ” Analisis Pengaruh Kebijakan Infrastruktur Terhadap Pendapatan Perkapita Masyarakat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Kabupaten Bangka merupakan bagian dari Provinsi Bangka Belitung. Kabupaten ini memiliki asset pariwisata yang sangat indah. Untuk pengembangan sektor pariwisata diperlukan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang memadai. Infrastruktur yang sangat diperlukan dalam keberlangsungan pengembangan tersebut adalah transportasi dan listrik, sehingga akan terlihat keterkaitan antara pengembangan pariwisata,

infrastruktur dan tingkat pendapatan perkapita masyarakat kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk melihat keterkaitan tersebut digunakan alat analisis multiple linier regression dengan tehnik Ordinary Least Square. Data yang digunakan adalah data APBD dari tahun 1989 – 2008 yang bersumber dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variable pariwisata, transportasi dan listrik berpengaruh significant terhadap pendapatan perkapita masyarakat kabupaten Bangka.

2. Eka Evita (2013)

Melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima”. Keberadaan pedagang kaki lima di sekitar alun-alun Kota Batu dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Seiring dengan adanya proyek pembangunan alun-alun, Pemerintah Kota Batu bermaksud melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang semula berjualan di sekitar alun-alun Kota Batu dengan merelokasi pedagang kaki lima pada satu tempat, yakni *Batu Tourism Center* (BTC). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penataan pedagang kaki lima, implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* di Kota Batu.

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan antara lain menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada *Batu Tourism Center* merupakan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan dan kendala sehingga sebagian besar pedagang kaki lima memilih kembali berjualan di sepanjang jalan dan meninggalkan BTC.

3. Riza (2013)

Melakukan penelitian dengan judul “Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Relokasi PKL Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo)”. Penelitian dilakukan dengan pendekatan survey dengan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Fokus penelitian ini dilihat dari 4 unit sosial yang terkena dampak kebijakan yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz, yaitu: Individual, Organisasional, Masyarakat, Lembaga dan Sistem Sosial. Pada dampak individual terutama sosial, setelah direlokasi ke GOR Delta terjadi persaingan antar pedagang semakin ketat. Selain persaingan antar sesama pedagang asli juga adanya persaingan antara pedagang asli dengan pedagang musiman yang tiap hari Minggu pagi datang ke GOR Delta.

Pada dampak organisasional, kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) mengakibatkan dampak organisasional atau kelompok terhadap para

pedagang. Adanya kebijakan relokasi ini dapat dirasakan dampaknya secara langsung oleh kelompok “Paguyuban Pedagang Kaki (PKL) Bersatu” yang berjualan di GOR Delta Sidoarjo. Sedangkan dampak tidak langsung dari kebijakan relokasi adalah adanya semangat kerja dan gotong royong antar kelompok Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Bersatu.

Pada dampak masyarakat, dengan adanya kebijakan relokasi tersebut membuat masyarakat pengguna (*user*) merasa senang karena masih bisa memenuhi kebutuhannya. Serta ada juga masyarakat sekitar GOR Delta yang merasa terganggu dengan adanya relokasi tersebut, karena menurut mereka GOR Delta menjadi tampak semrawut oleh PKL pindahan dari Alun-alun Kabupaten Sidoarjo. Pada dampak lembaga dan sistem sosial, adanya kebijakan ini membuat GOR Delta tampak tidak teratur. Banyak hal yang harus dibenahi yaitu masalah penerangan dan lampu. Penerangan di area Gelora Delta menjadi suram, yang paling tampak disisi barat. Saat malam hari di sisi barat banyak berdiri warung yang terkesan remang-remang. Selain membuat GOR Delta tampak suram karena minimnya penerangan juga membuat pemandangan menjadi kumuh, pedagang membuat taman mati.

4. Nisa Shifa Rahimah dan Heru Purboyo Hidayat Putro (2013)

Melakukan penelitian terkait tentang “Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Sebaran Investasi di Provinsi Jawa Barat”. Pembangunan infrastruktur diyakini mempunyai peran yang penting sebagai tulang punggung distribusi baik barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan

aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi.. Infrastruktur jalan dinilai akan memberikan pengaruh. Provinsi Jawa Barat memiliki sumber daya yang sangat melimpah yang dapat dieksploitasi mulai dari sumber daya alam dan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh infrastruktur terhadap sebaran investasi di Provinsi Jawa Barat. Analisis yang dilakukan adalah melihat perkembangan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2007-2011, kemudian melihat pola sebaran investasi di Provinsi Jawa Barat. Kedua analisis tadi dikaji menggunakan analisis deskriptif.

Kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui pengaruh infrastruktur terhadap sebaran investasi dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan dibantu oleh metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terjadi peningkatan perkembangan infrastruktur dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Sektor jasa atau tersier untuk investasi asing dan dalam negeri cenderung berada di daerah perkotaan atau daerah yang cukup maju secara ekonomi. Sedangkan sektor primer terdapat di daerah perkotaan namun terdapat juga daerah perdesaan. Untuk sektor sekunder sebagai sektor dominan terjadi pemusatan distribusi di daerah-daerah yang merupakan pusat pertumbuhan. Adanya infrastruktur memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan investasi di Provinsi Jawa Barat. Infrastruktur jalan memiliki pengaruh positif untuk perkembangan investasi di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu

pengadaan infrastruktur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat diperlukan.

5. Desi Widya Lutfy (2001)

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Widya Lutfy di Universitas Gajah Mada, tahun 2001 yang berjudul “Dampak kebijakan relokasi pedagang pasar *shopping* bagi para pedagang di pasar induk Giwangan Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perumusan kebijakan pemerintah kota Yogyakarta tentang relokasi pedagang pasar *shopping* dan mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan relokasi pedagang pasar *shopping* bagi pedagang eks pasar *shopping*.

Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling* dan *before and after*. Penggunaan metode ini dipilih karena responden yang dijadikan sampel telah memiliki kriteria yang sesuai dengan penelitian ini dan dimaksudkan untuk mengupas tentang dampak dari sebuah kebijakan publik yaitu relokasi pedagang pasar *shopping* ke-pasar Giwangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap relokasi pedagang pasar *shopping* sebagai sebuah rangkaian proses kebijakan yang dilaksanakan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Desi Widya Lutfy dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dan menganalisis dampak kebijakan tentang relokasi pasar untuk para pedagang. metode yang digunakan pun memiliki persamaan yaitu menggunakan metode *purpose*

sampling dan *before – after*. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Desi Widya Lutfy dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, untuk mengetahui proses perumusan kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta tentang relokasi pasar dan dampak yang ditimbulkan di pasar *shopping*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui dampak kebijakan relokasi pedagang pasar pasca kebakaran yang dilihat dari sisi pedagang dan masyarakat.

6. Annisa Anindya (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Anindya di Universitas Pasundan Bandung, tahun 2016 yang berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Pasca Kebakaran Pasar dari Sisi Pedagang dan Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengatur para pedagang pasar, dampak bagi pedagang pasar dengan adanya kebijakan relokasi sementara pedagang dan untuk mengetahui dampak bagi masyarakat setempat dengan adanya kebijakan relokasi sementara pedagang pasca kebakaran pasca kebakaran.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Metode deskriptif digunakan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan dalam menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana dampak kebijakan relokasi pasar yang dirasakan oleh para pedagang Pasar Panorama Lembang dan masyarakat sekitar, apakah

kebijakan yang diberikan oleh pemerintah setempat memberikan dampak yang baik dan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Anindya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dan menganalisis dampak kebijakan tentang relokasi pasar untuk para pedagang. metode yang digunakan pun memiliki persamaan yaitu menggunakan metode *purpose sampling* dan *before – after*.

7. Tomi Rahmat Gumilar (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Tomi Rahmat Gumilar di Universitas Pasundan Bandung, tahun 2017 yang berjudul “Analisis Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Terhadap Revitalisasi Pasar Sebagai Infrastruktur Ekonomi Kota (studi kasus di sekitar pasar kosambi)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dan pengorbanan yang dirasakan pedagang kaki lima, pembeli, masyarakat pengguna jalan serta pemerintah daerah akibat relokasi pedagang kaki lima di sekitar pasar kosambi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Metode deskriptif digunakan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan dalam menjawab rumusan masalah yaitu apa dan berapa besar manfaat dan pengorbanan yang dirasakan pedagang kaki lima, pembeli, dan masyarakat pengguna jalan akibat relokasi pedagang kaki lima di sekitar pasar kosambi,

apakah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah memberikan manfaat dan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan atau bahkan sebaliknya.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tomi Rahmat Gumilar dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dan menganalisis pengorbanan yang dirasakan oleh masyarakat pengguna jalan akibat relokasi pedagang kaki lima melihat dari biaya yang dikeluarkan akibat adanya pedagang kaki. Metode yang digunakanpun memiliki persamaan yaitu menggunakan metode *purpose sampling*

2.3 Kerangka Pemikiran

Dewasa ini secara *universal* diketahui bahwa dalam rangka mengatasi sifat kaku yang ada di negara terbelakang maupun berkembang, pemerintah harus memegang peranan positif yang tidak boleh bertindak sebagai penonton pasif. Problema yang ada sedemikian besarnya sehingga problema itu tidak bisa diserahkan begitu saja kepada mekanisme bebas kekuatan-kekuatan ekonomi. Perusahaan swasta kurang mampu menyelesaikan problema tersebut karena pengertian tersebut tidak ditemui di era modern. Oleh karena itulah peran pemerintah sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi baik berupa tindakan maupun berupa kebijakan. Dimana ruang lingkup pemerintah sangatlah luas dan menyeluruh. Menurut Prof. Lewis lingkup itu mencakup “penyelenggaraan layanan umum, menentukan sikap, membentuk lembaga-lembaga ekonomi, menentukan penggunaan sumber, menentukan distribusi pendapatan,

mengendalikan jumlah uang, mengendalikan fluktuasi, menjamin pekerjaan penuh, dan menentukan laju investasi”.

Pembangunan infrastruktur sejatinya merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan usaha. Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005). Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas para usaha yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah.

Berbagai pelayanan yang dapat memfasilitasi masyarakat dalam beraktivitas disebut juga dengan infrastruktur. Berdasarkan American Public Works Association (Stone, 1974), infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Permasalahan transportasi menurut Tamin (1997:5) tidak hanya terbatas pada terbatasnya prasarana transportasi yang ada, namun sudah merambah kepada aspek-aspek lainnya, seperti pendapatan rendah, urbanisasi yang cepat, terbatasnya sumber daya, khususnya dana, kualitas dan kuantitas data yang berkaitan dengan transportasi, kualitas sumber daya manusia, disiplin yang

rendah, dan lemahnya perencanaan dan pengendalian, sehingga aspek-aspek tersebut memperparah masalah transportasi. Menurut Sukarto (2006) penyelesaian masalah transportasi di perkotaan merupakan interaksi antara transpor, tata guna lahan (*land use*), populasi penduduk dan kegiatan ekonomi di suatu wilayah perkotaan. Sehingga transportasi sangat berhubungan dengan adanya pembangkitan ekonomi di suatu daerah perkotaan guna memacu perekonomian setempat, penciptaan lapangan kerja, dan untuk mengerakan kembali suatu daerah.

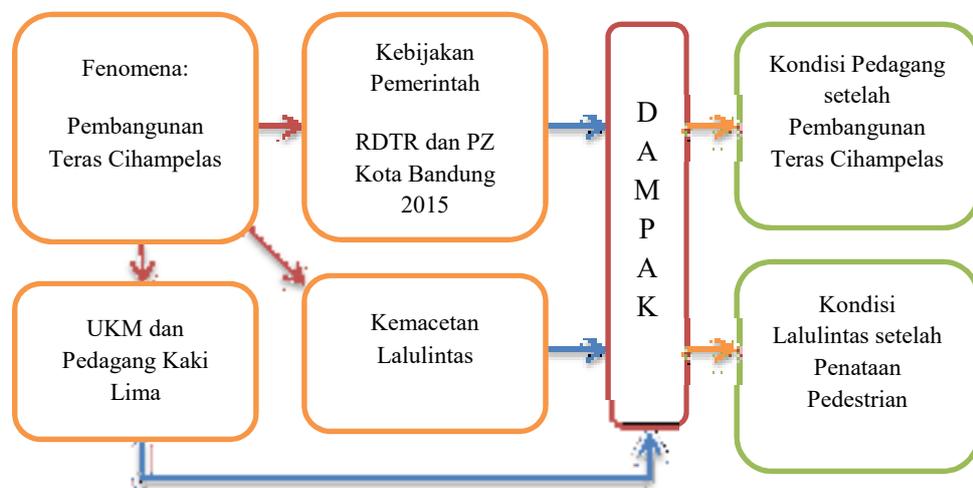
Dalam hal ini terkait pembangunan infrastruktur Teras Cihampelas memiliki beberapa dampak yang mempengaruhi kegiatan kawasan tersebut karena pada dasarnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan wilayah sekitar dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Setidaknya dalam penelitian ini dirasa mempengaruhi beberapa faktor yaitu antara lain pendapatan disebabkan oleh terdorongnya sektor perdagangan oleh kawasan yang memang ditunjang oleh infrastruktur teras cihampelas sebagai wilayah pariwisata kota Bandung dan disamping itu, dengan adanya relokasi pedagang kaki lima yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menimbulkan sisi positif dari segi transportasi atau kemacetan, dengan adanya relokasi ini masyarakat sekitar bahkan masyarakat yang hanya melintas di jalan tersebut, masyarakat dapat menempuh perjalanan dengan lebih cepat yang mana perpindahan pedagan kaki lima yang sebelumnya memadati fasilitas pedestrian di pindahkan untuk mengisi kios-kios yang disediakan di atas teras cihampelas.

Evaluasi dampak dapat menggunakan jenis studi evaluasi yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa, 1994: 74) yaitu menggunakan *single program before after*. Dimana evaluator hanya menggunakan kelompok eksperimen yaitu kelompok yang dikenai kebijakan untuk memperoleh data dari evaluasi dampak kebijakan ini. Dalam menggunakan jenis evaluasi *single program before after* ini untuk memperoleh data mengenai keadaan pedagang formal jalan Cihampelas sebelum dan sesudah pelaksanaan pembangunan dari infrastruktur Teras Cihampelas tersebut.

Sebagaimana yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung dalam pembangunan infrastuktur berupa pembangunan Teras Cihampelas yang mana di atur dalam beberapa pasal dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Tahun 2015-2035. Pembangunan ini bertujuan untuk mengatasi dan mengatur permasalahan untuk pedestrian dan sarana pendukung transportasi serta kegiatan perdagangan wilayah tersebut dalam meningkatkan peranan dan kualitasnya terhadap Kota Bandung.

Teras Cihampelas hadir sebagai salah satu rencana pemerintah dalam mengembangkan usaha-usaha kecil dan menengah yang sebelumnya bertempat di pedestrian kawasan Cihampelas yang kemudian di berikan tempat yang layak dan sama rata dengan konsep taman kota untuk lebih memanjakan para wisata yang datang ke tempat tersebut. Peraturan dan kebijakan yang di buat pemerintah tentunya tidak semata mata hanya sebagai hiasan belaka, melainkan untuk menjadikan fungsi pemerintahan ini bukan hanya sebagai penonton pasif. Pemerintah tentunya menginginkan adanya perkembangan di wilayah Teras

Cihampelas terutama bagi para pelaku usaha Teras Cihampelas. Selain itu, dengan adanya penataan tata ruang dan tempat bagi para pedagang tentunya membuat setiap pelaku usaha harus bisa menyesuaikan dengan suasana serta aturan baru yang diatur oleh pemerintah Kota Bandung. Berikut kerangka pemikiran mengenai penelitian ini seperti yang ada pada gambar 2.2



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan/pernyataan sementara yang diungkapkan secara deklaratif yang menjadi jawaban dari sebuah permasalahan. Pernyataan tersebut diformulasikan dalam bentuk variable agar bisa diuji secara empiris.

Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian dan melihat hasil penelitian sebelumnya serta kerangka pemikiran teoritis tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa:

1. Diduga adanya perubahan pendapatan pedagang formal sekitar jalan Cihampelas sebelum dan setelah pembangunan infrastruktur Teras Cihampelas.
2. Diduga adanya perubahan kondisi kemacetan jalan sebelum dan setelah pembangunan infrastruktur Teras Cihampelas